

## ANALISIS KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

Qothrun Nada Giarti<sup>1\*</sup>, Dwi Susilowati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Malang  
nadagiarti177@email.com<sup>1\*</sup>, dwi\_s@email.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Dengan fokus utama pada berbagai aspek kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan pembangunan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendapatan asli daerah (PAD), dan upah minimum provinsi (UMP) secara bersamaan dan terpisah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2015 – 2022. Pada studi ini memakai pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi data panel. Temuan penelitian menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan, dan UMP memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam upaya untuk mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia di setiap provinsi di Indonesia

**Kata Kunci : IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PAD, UMP**

### ABSTRACT

*With a main focus on various aspects of quality of life, the Human Development Index is used as a measuring tool to assess the development of human development. The aim of this research is to determine the influence of the variables economic growth, poverty, local revenue (PAD), and provincial minimum wage (UMP) simultaneously and separately on the Human Development Index in Indonesia during the 2015–2022 period. This research uses a quantitative approach with panel data regression techniques. The research conclusion states that the variables of economic growth and poverty have a negative and significant influence on HDI, PAD has a positive and significant influence, and UMP has a positive but not significant influence on HDI. The results of this research can help in efforts to develop a Human Development Index in each province in Indonesia.*

*Keywords: HDI, Economic Growth, Poverty, PAD, UMP*

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara dapat diamati melalui perkembangan ekonomi, yang diikuti oleh perubahan dalam sektor perekonomian bertujuan menggabungkan berbagai sumber daya untuk mencapai hasil akhir yang menguntungkan bagi masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu alat penting untuk mengukur kesejahteraan dan standar hidup suatu negara adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini mencakup indikator seperti umur panjang dan sehat, pendidikan, dan pendapatan perkapita. Indeks ini memberikan pengukuran pembangunan yang komprehensif, karena tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga mencakup aspek - aspek esensial kebahagiaan manusia.

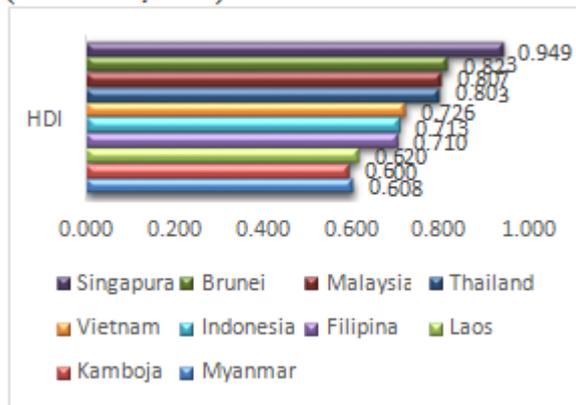
Paradigma pembangunan saat ini berpusat pada pertumbuhan ekonomi, mengukur pada pembangunan manusia dengan memperhatikan taraf hidup masyarakat di setiap negara (Syofya, 2018). *Human Resource Development* atau dengan kata lain dapat disebut perkembangan

SDM sangat berkaitan dengan kapasitas sumber daya yang harus dialokasikan. Dana yang dikeluarkan akan difungsikan untuk pembangunan dan peningkatan SDM dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam meraih kesempatan kerja sehingga perekonomian semakin naik.

*Human Development Index* (HDI) diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 yang bertujuan untuk menggarisbawahi manusia dan keterampilannya sebagai metrik utama dalam mengukur pembangunan suatu negara, tidak hanya menurut pertumbuhannya ekonominya. Pertumbuhan ekonomi memang berpengaruh terhadap tingkat pembangunan yang nantinya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, akan tetapi tingginya pertumbuhan belum tentu menggambarkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Terlebih lagi, ketika laju pertumbuhan ekonomi bertumbuh dengan pesat tetapi tidak diiringi dengan peningkatan distribusi kepada seluruh masyarakat



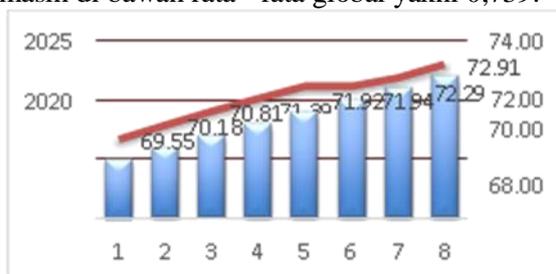
(Handalani, 2018).



**Gambar 1. Grafik HDI ASEAN 2022**

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan data (UNDP 2022), di tingkat ASEAN Indeks Pembangunan Manusia yang dicerminkan oleh HDI, Indonesia menempati posisi 112 dari 193 negara yang masuk didalam riset. Sedangkan pada tingkat negara - negara di ASEAN Indonesia menempati ranking keenam dengan peringkat pertama yakni Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar dan yang terakhir Timor Leste. Dengan nilai 0,713, indeks pembangunan manusia Indonesia termasuk dalam kategori tinggi untuk pembangunan manusia. Namun, nilai Indonesia masih di bawah rata - rata global yakni 0,739.



**Gambar 2. Grafik IPM Indonesia 2015 – 2022**

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Badan Pusat Statistik, 2024), nilai IPM di Indonesia selalu meningkat sejak tahun 2018 sampai 2022. Nilai IPM pada tahun 2018 sebesar 71,39, hingga pada tahun 2022 naik menjadi 72,91. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia secara keseluruhan semakin membaik. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya mampu tumbuh sebesar 0,03 persen, capaian ini lebih lambat daripada tahun sebelumnya. Keadaan tersebut terjadi karena pandemi Covid - 19 yang

mempengaruhi pengeluaran per kapita yang disesuaikan sehingga memperlambat pertumbuhan IPM.

Meskipun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terjadi setiap tahun, akan tetapi masih terjadi adanya permasalahan ketidakmerataan capaian kualitas manusia di provinsi dan kabupaten/kota. Artinya terdapat beberapa provinsi yang capaian IPM yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Pada tahun 2022, terdapat 10 provinsi dengan nilai IPM di atas rata - rata dan 24 provinsi lainnya di bawah rata - rata nasional. Nilai IPM tertinggi diduduki provinsi DKI Jakarta dengan angka 81,65 dan terendah diduduki provinsi Papua yang nilainya mencapai 61,39 dan masuk dalam kategori sedang. Ketidakmerataan ini dapat berdampak pada ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka panjang.

Di era globalisasi saat ini, kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi perkembangan suatu negara. Kemajuan suatu negara tidak dapat dilihat dari sisi pendatan perkapita saja, akan tetapi harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya. Pada dasarnya, peningkatan perekonomian berarti meningkatnya kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Hal ini lebih menekankan perubahan kuantitatif dan biasanya diukur dengan data pendapatan per kapita atau PDB. Laju pertumbuhan perekonomian menunjukkan persentase pertumbuhan pendapatan riil nasional dari tahun ke tahun, yang menggambarkan laju pertumbuhan produksi pada suatu wilayah. Peningkatan output per kapita akan menaikkan daya beli seseorang, yang akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan ketika semakin cepat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat pula peningkatan output di wilayah tersebut (Muhamad & Rahmi, 2023).

Kemiskinan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap IPM. Sebuah negara dianggap sejahtera atau makmur jika jumlah penduduk miskin hanya sedikit. Kemiskinan ini bermula dari kurangnya kemampuan daya beli seseorang dalam pemenuhan kepentingan dasar hidupnya. Akibatnya, kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan juga tidak terpenuhi karena pendapatan masyarakat di bawah pendapatan riil minimum. Ketika tingkat kemiskinan terus meningkat seiring waktu dan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ini akan menjadi “lingkaran setan



kemiskinan". Akibatnya, ini berdampak pada penurunan produktivitas masyarakat dan akan menciptakan masalah bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan akan menghasilkan masyarakat kurang terdidik dan tertinggal (Hasibuan et al., 2020)

Pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari gaji atau upah yang didapatkan. Upah ini merupakan sumber pendapatan dari perusahaan berdasarkan kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak. Jika upah naik tentu akan mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia, dan sebaliknya penurunan pendapatan masyarakat akan mengurangi nilai IPM dan meningkatkan angka kemiskinan. Kebijakan pengupahan pemerintah bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan buruh dengan memastikan tidak ada nilai upah yang kurang dari upah minimum yang diamanatkan pemerintah. Penerapan sistem pengupahan di Indonesia pada dasarnya berfungsi untuk menjamin standar hidup yang layak bagi karyawan dan keluarganya, serta menggambarkan balasan atas hasil kerja dan dengan peningkatan upah yang tinggi akan mendorong produktivitas kerja (Suhartini, 2020).

Dalam rangka pembangunan nasional yang berkeadilan, khususnya peningkatan sumber daya perekonomian guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf pembangunan manusia, pemerintah menerbitkan kebijakan otonomi daerah yang mana daerah diberikan hak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam konteks desentralisasi, pendapatan utama daerah merupakan aspek penting dalam menunjang kapasitas daerah. Hal ini disebabkan karena semakin besar PAD suatu daerah ini dapat mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat dan dapat dilihat tingkat kemandirian suatu daerah dalam melakukan pembiayaan pada daerahnya sendiri (Patadang & Rotinsulu, 2021).

Menurut penelitian sebelumnya (Rinawati et al., 2022) menemukan IPM dipengaruhi positif dan signifikan oleh pertumbuhan ekonomi. (Komariyah et al., 2023) menampilkan IPM dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh variabel kemiskinan. Pada penelitian (Sarkoro & Zulfikar, 2018) Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah. (Harjunadhi & Rahmawati, 2020) pada penelitiannya mengatakan indeks pembangunan manusia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh

upah minimum. Akan tetapi, studi lain juga menyatakan temuan yang berbeda (Handayani & Woyanti, 2021) menyatakan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak berdampak. (Ramadanisa & Triwahyuningtyas, 2022) bahwa IPM di Provinsi Lampung tidak dipengaruhi kemiskinan. Penelitian (Karampuan et al., 2023) memperlihatkan hasil IPM di Sumatera Barat tidak dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Izzah & Hendarti, 2021) mengatakan IPM di Jawa Tengah dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh upah minimum provinsi.

Keterbaruan dari penelitian ini merupakan gabungan variabel - variabel yang mempunyai pengaruh signifikan dari penelitian - penelitian sebelumnya, dengan objek penelitian di Indonesia selama 2015 - 2022. Dengan mempertimbangkan kondisi yang disebutkan di atas, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, upah minimum provinsi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia secara parsial dan simultan. Hal ini layak dibahas karena mengacu pada rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang mengacu pada tujuh prioritas nasional, termasuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Hasil studi ini diharapkan menghadirkan informasi mengenai permasalahan dan faktor yang berpengaruh pada IPM di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam melakukan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan (BPS, 2024), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menilai berbagai aspek pembangunan manusia, berdasarkan beberapa komponen yang mendukung kualitas hidup. Ada tiga indikator yang menjadi landasan terciptanya IPM yakni pengetahuan, umur panjang dan sehat, dan standar hidup layak. Pada kurun waktu teori ekonomi neoklasik menjelaskan modal manusia dinilai berkaitan dengan investasi manusia dalam bidang pendidikan, pelatihan profesional, dan pelatihan ulang (Zaborovskaia et al., 2020). *Human Development Index* merupakan alat komprehensif yang dirancang oleh PBB untuk mengukur tingkat pembangunan sosial dan ekonomi.



Pembangunan manusia bertujuan utama meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Tujuannya mencakup peningkatan kesehatan dan harapan hidup melalui akses layanan kesehatan, nutrisi, dan sanitasi yang lebih baik lagi. Peningkatan pendidikan dan keterampilan diupayakan melalui akses yang lebih baik ke pendidikan formal dan pengembangan keterampilan non - formal, dengan harapan masyarakat lebih terampil dan dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik. Pembangunan manusia juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan kesempatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan bantuan sosial. Reduksi ketidakesetaraan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi diupayakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Pemberdayaan perempuan ditekankan melalui akses setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan di tingkat rumah tangga dan masyarakat. Peningkatan standar hidup melibatkan upaya untuk meningkatkan daya beli, akses perumahan layak, dan ketersediaan barang dan layanan yang mendukung kehidupan yang baik. Rumus berikut diperlukan untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana :

$X_1$  : lama hidup

$X_2$  : tingkat pendidikan

$X_3$  : standar hidup layak yang menggunakan indikator kemampuan daya beli.

Pembangunan manusia dibagi menjadi empat menurut kriteria United Nations Development Program (UNDP), yaitu IPM > 80 pada klasifikasi sangat tinggi, IPM 70 - 79 pada klasifikasi tinggi, IPM 60 - 69 pada klasifikasi sedang, dan IPM < 60 masuk ke klasifikasi rendah. IPM Indonesia pada tahun 2022 memiliki angka di atas 70, ini menandakan tingkat pembangunan manusia di Indonesia masuk pada kategori tinggi.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut (Sukirno, 2013) didefinisikan sebagai perluasan aktivitas ekonomi yang ditujukan untuk menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat.

BPS (2024) menyatakan PDRB adalah nilai total produk dan jasa final (bersih) yang

diproduksi oleh perekonomian secara keseluruhan, atau volume nilai yang didapatkan oleh semua perusahaan ditambahkan di suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga konstan (riil) memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan tahunan perekonomian secara keseluruhan atau setiap sektor perekonomian. Sedangkan Kuznets menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan berkelanjutan dalam kapasitas suatu negara untuk menawarkan keuntungan finansial yang lebih besar kepada warganya.

Dalam teori Neoklasik, Robert Sollow dan Trevor Swan berpendapat bahwa peningkatan pasokan input produksi seperti tenaga kerja, populasi, akumulasi modal, dan kemajuan teknis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori tersebut, perkembangan ekonomi suatu negara tergantung pada tingkat kemajuan teknologi, akumulasi modal, dan pertumbuhan penduduk (Mulyaningsih, 2011).

Studi (Bahasoan et al., 2019) dan (Nugraeni, 2021) memperlihatkan hasil yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasarkan temuan penelitian dan teori, dapat diungkapkan dalam bentuk hipotesis berikut :

H1 : Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

### **Kemiskinan**

BPS (2024) mengartikan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh ketidakmampuan perekonomian dalam mencukupi kepentingan hidupnya, baik makanan maupun non - makanan, yang dinyatakan dalam pengeluaran. Oleh sebab itu, jika pendapatan per kapita rata - rata bulanan seseorang berada di bawah ambang batas kemiskinan, maka ia dianggap miskin. Kemiskinan dianggap sebagai suatu masalah atau hambatan dalam proses pembangunan sebuah negara. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya ini juga berdampak pada kurangnya pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak sehingga tingkat pendidikan yang dimiliki rendah. Ketika terus terjadi kemiskinan yang berkelanjutan akan berpengaruh terhadap kualitas SDM yang nantinya akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu negara.

Teori Nurske menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang rendah itu dipengaruhi tingkat kemiskinan, ketika seseorang dalam kondisi miskin akan menyebabkan produktivitas dan pendapatan rendah yang



nantinya berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara khusus, Todaro menggunakan persamaan berikut untuk mendefinisikan fungsi kesejahteraan:  $W = W(Y, I, P)$ .  $Y$  mewakili pendapatan per kapita,  $I$  merujuk pada ketidaksetaraan, dan  $P$  menggambarkan kemiskinan absolut. Dalam kaitannya dengan persamaan fungsi kesejahteraan tersebut, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial memiliki pengaruh negatif dengan tingkat kemiskinan, tetapi hubungan positif dengan pendapatan per kapita.

Studi yang dilakukan (Hidayat & Woyanti, 2021) dan (Maulana et al., 2022), mencapai hasil yang serupa, yakni kemiskinan berdampak negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sehubungan dengan dasar teori dan temuan penelitian, dapat diungkapkan dalam bentuk hipotesis berikut ini:  
H1 : Diduga kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

#### **Upah Minimum Provinsi**

Upah atau gaji merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada seorang karyawan sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang diamanatkan secara hukum antara pemberi kerja dan pekerja. Salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah rendahnya tingkat upah dibandingkan dengan negara lain yang disebabkan rendahnya produktivitas dan banyaknya pencari kerja di Indonesia.

Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah minimum merupakan tolak ukur yang dipakai oleh pemilik bisnis dan pelaku industri lainnya dalam menentukan berapa besarnya gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan di tempat kerja atau lingkungan bisnis. Pada wilayah provinsi Gubernur menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Besaran upah yang berlaku pada kabupaten atau kota dalam suatu provinsi disebut dengan upah minimum provinsi.

Tingkat upah minimum yang ditetapkan Gubernur disetiap daerah ini akan berpengaruh terhadap banyaknya tingkat pengangguran yang ada, karena semakin besar nilai upah akan terjadi penurunan tenaga kerja. Perbedaan upah yang ada pada setiap daerah ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat kehidupan dan biaya yang dikeluarkan. Menurut teori upah efisiensi (*efficiency wage*), mengatakan ketika upah yang diperoleh tinggi ini akan menyebabkan

pekerja lebih produktif dibanding dengan nilai upah yang rendah. Tinggi dan rendahnya nilai upah juga menjadi faktor penting dalam taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Kiha et al., 2021).

Studi oleh (Harjunadhi & Rahmawati, 2020) dan (Sania et al., 2021) secara konsisten memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi positif dan berdampak oleh upah minimum. Hipotesis berikut dapat digunakan untuk menjelaskan berdasarkan teori dan temuan :

H1 : Diduga upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

#### **Pendapatan Asli Daerah**

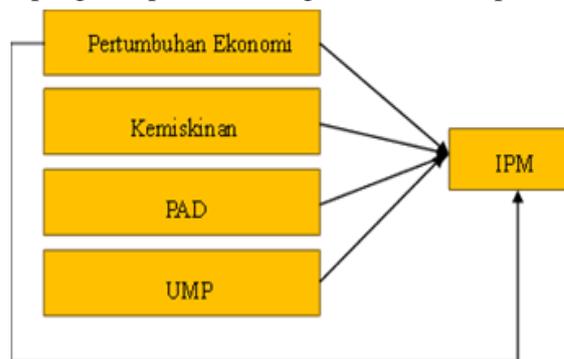
Peningkatan PDRB dan APBD seringkali menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal sebagaimana didefinisikan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah proses ketika daerah otonom mendapatkan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengurus anggaran daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah komponen penting dalam pembiayaan daerah. PAD merujuk pada pendapatan yang berasal dari sumber asli wilayah, termasuk retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan aset wilayah yang terpisah, serta pendapatan dari dinas dan pendapatan yang sah menurut undang - undang.

Upaya untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam konteks ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dilakukan dengan menganalisis PAD yang diperoleh. Ini karena semakin besar PAD yang diterima, maka semakin banyak manfaat yang diberikan kepada masyarakat melalui peningkatan fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut (Mankiw, 2007), dalam konteks PAD ini dapat dijelaskan oleh teori keynesian yang menjelaskan bahwa peningkatan pemerintah atau pengeluaran akan meningkatkan pengeluaran yang telah direncanakan, yang pada gilirannya akan terjadi peningkatan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan terjadi peningkatan PAD, secara otomatis pengeluaran juga akan meningkat, hal ini berpotensi memberikan pengaruh positif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Studi yang dilaksanakan (Hobrouw et al., 2021) dan (Fernandes & Putra, 2022) menunjukkan hasil yang sama adanya pengaruh positif dan signifikan. Hipotesis berikut dapat dikembangkan berdasarkan teori dan temuan penelitian:



H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.



Gambar 3. Kerangka Berpikir

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada riset ini adalah kuantitatif. Data penelitian ini berasal dari gabungan data runtun waktu (*time series*) selama delapan tahun (2015 – 2022) dan data *cross section* dari 34 provinsi di Indonesia. Jumlah observasi dalam penelitian ini berjumlah 272 unit. Studi ini memakai analisis regresi data panel untuk mengetahui apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dengan didukung oleh software ekonometrika *eviews 12*. Variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, upah minimum provinsi (UMP), dan pendapatan asli daerah (PAD) digunakan sebagai faktor independen dalam analisis data ini, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia berfungsi sebagai variabel dependen. Data pada kajian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dalam penelitian ini model regresi data panel yang dipakai adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Indeks Pembangunan Manusia (%)

X<sub>1</sub> : Pertumbuhan ekonomi (%)

X<sub>2</sub> : Kemiskinan (%)

X<sub>3</sub> : Upah Minimum Provinsi (Juta)

X<sub>4</sub> : Pendapatan Asli Daerah (miliar)

$\beta_0$  : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \dots$  : Koefisien regresi variabel independen

$\beta_3, \beta_4$

e : komponen error

Selanjutnya, terdapat tiga serangkaian pengujian data panel meliputi *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

### Pemilihan Metode Pengujian Data Panel Uji Chow

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tes ini memilih *Common/Pool Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* untuk melihat model mana yang lebih baik. Model efek umum merupakan yang paling tepat diterapkan jika hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima. Namun jika temuan menolak hipotesis nol, maka model efek tetap adalah model terbaik.

### Uji Hausman

Hausman tes dipakai untuk mengevaluasi model efek tetap atau efek acak mana yang paling cocok untuk estimasi data panel. Model Random Effects paling tepat diterapkan jika hasil Uji Hausman mendukung hipotesis nol. Meskipun demikian, model Pengaruh Tetap merupakan cara yang paling tepat diterapkan jika menyangkal hipotesis nol.

### Uji Lagrange Multiplier

Pengujian ini digunakan dalam situasi di mana uji Chow memutuskan efek umum dan uji Hausman memutuskan efek acak. Namun, jika kedua uji tersebut konsisten dalam memilih model efek tetap sebagai yang terbaik, maka uji LM tidak diperlukan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan antara model CEM atau model REM yang lebih sesuai untuk regresi data panel (Basuki, 2021).

### Uji Hipotesis

#### 1. Uji T

Hasil uji ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak variabel independen terhadap variabel terikat secara individual. Tingkat signifikansi pengujian ini adalah 0,05. Jika nilainya kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, jika lebih besar dari 0,05 maka ditolak.

#### 2. Uji Signifikasni Simultan (Uji F)

Tujuan pengujian ini untuk memastikan adanya dampak keseluruhan dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, jika lebih besar dari 0,05 maka ditolak.

#### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Statistik  $R^2$  memperlihatkan seberapa besar variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh faktor independen. Kisaran koefisien determinasi mempunyai rentang 0 sampai 1. Dimana nilai yang besar memperlihatkan semakin kuatnya kontribusi variabel independen. Sebaliknya, ketika nilainya semakin rendah maka kemampuan variabel bebas dalam memprediksi variabel terikat semakin menurun seiring dengan menurunnya nilai.

**Uji Pemilihan Model**

**Tabel 1. Hasil uji chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.001030	(33,234)	0.0017
Cross-section Chi-square	67.612303	33	0.0004

Sumber : Eviews 12, 2024

Hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar 0.0004 artinya nilainya kurang dari 0,05. Oleh karena itu, keputusan

diambil untuk menolak H0 dan menerima H1. Ini dapat dikatakan model efek tetap ini lebih cocok dibandingkan dengan model *common effect*

**Tabel 2. Hasil uji hausmant**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross - section random	10.362901	4	0.0347

Sumber : Eviews 12, 2024

Probabilitas sebesar 0.0347 temuan uji Hausman yang menunjukkan nilai tersebut kurang dari dari 0,05. Akibatnya, dimungkinkan menolak H0 dan menerima H1. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Model Efek Acak, Model Efek Tetap lebih cocok dengan data. Model efek tetap mengungguli model efek

umum dan model efek acak, menurut temuan uji Chow dan Hausman, yang digunakan untuk menentukan model mana yang terbaik. Oleh karena itu, kesimpulannya model terbaik adalah model efek tetap atau FEM dan uji *Lagrange Multiplier* tidak perlu dilakukan

**Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51.19597	14.24730	3.593380	0.0004
Pertumbuhan Ekonomi	-0.133603	0.052949	-2.523225	0.0123
Kemiskinan	-0.368352	0.029524	-12.47650	0.0000
LN_Upah	0.697975	0.943737	0.739587	0.4603
LN_PAD	0.608681	0.121704	5.001337	0.0000
			R-squared	0.664031
			F-statistic	12.49983
			Prob (F statistic)	0.000000

Sumber : Eviews 12, 2024

**Uji T**

Hipotesis alternatif yang menunjukkan bahwa setiap variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat dapat diterima jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hasil estimasi menunjukkan probabilitas pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0123, kemiskinan 0.0000, upah 0.4603, pad 0.0000. Pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan merupakan variabel yang secara individual mempengaruhi variabel terikat sementara itu variabel upah minimum signifikan.

**Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)**

Menurut hasil regresi dari model terbaik, terungkap bahwa nilai F-statistic adalah 12.49983 dengan probabilitas sebesar 0.000000. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di bawah tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor independen seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, upah, dan PAD secara bersamaan.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berdasarkan informasi dari data tersebut, dapat diidentifikasi bahwa R-Squared memiliki nilai 0.664031 atau setara dengan 66.40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, upah minimum provinsi, dan pendapatan asli daerah menyumbang sekitar 66,40% variasi IPM Indonesia selama tahun 2015 – 2022. Sedangkan sekitar 33,60 persen sisanya dipengaruhi aspek



lain yang tidak dimasukkan pada model kajian ini.

Persamaan regresi yang diturunkan memiliki bentuk sebagai berikut :

$$\text{IPM} = 51.19597 - 0.133603 \text{ Pertumbuhan Ekonomi} - 0.368352 \text{ Kemiskinan} + 0.697975 \text{ LNupah} + 0.608681 \text{ LN PAD}$$

### **Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap IPM**

Terlihat dari hasil estimasi regresi data panel terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan IPM. Nilai probabilitas sebesar 0,0123 kurang dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  yang menunjukkan hal tersebut. Koefisien sebesar - 0.133603 mencerminkan berpengaruh negatif. Sehingga, ketika tingkat PDRB naik 1% akan menurunkan IPM sebesar 0.13%, sehingga hipotesis penelitian ini ditolak. Hasil tersebut bertentangan dengan teori pertumbuhan neoklasik yang berpendapat pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dari pentingnya modal, tenaga kerja, dan teknologi. Model ini sejalan dengan tujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, karena dengan adanya modal dan kemajuan teknologi dapat meningkatkan IPM melalui pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini menunjukkan adanya dampak negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM pada tahun 2015 hingga 2022. Ini dikarenakan laju PDRB di Indonesia mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan sebesar 4.99. Kemudian meningkat dari tahun 2016 hingga 2018 menjadi 5.32. Namun demikian, angka tersebut turun mencapai 5,00 pada tahun 2019 dan -2,07 pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan menjadi 3.70 dan 5.31. Dengan laju PDRB yang berfluktuatif ini menyebabkan masyarakat tidak merasakan pertumbuhan ekonomi secara merata, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan dan ketidakmampuan masyarakat menikmati kehidupan yang layak. Karakteristik pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga cenderung padat modal daripada padat karya. Ini tercermin ketika pertumbuhan ekonomi tinggi akan meningkatkan produktivitas tetapi kurang terserapnya tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran juga akan meningkat dan ini akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, peran distribusi pendapatan sangat penting dalam kesejahteraan manusia. Karena kesejahteraan

masyarakat dianggap adil apabila penduduk menikmati hasil dari pembangunan.

Penelitian (Amelinda, 2022) dan (Pitaloka & Prabowo, 2022) menyatakan hasil negatif dan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia menguatkan hasil tersebut. Temuan kontradiktif terlihat pada penelitian (Azzahra & Desmawan, 2023) dan (Rinawati et al., 2022) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi positif dan signifikan oleh pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM**

Temuan studi ini menunjukkan kemiskinan berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini terindikasi oleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 atau kurang dari ambang signifikansi  $\alpha = 0.05$ . Pengaruh negatif ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar - 0.368352. Sehingga, jika tingkat kemiskinan naik 1% dapat menurunkan IPM sejumlah 0.36%, sehingga hipotesis penelitian ini diterima. Hasil ini sejalan dengan teori Nurske dimana ketika pendapatan seseorang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah, rendahnya produktivitas menyebabkan kemampuan menabung masyarakat rendah, maka dari itu masyarakat akan kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menurunkan nilai IPM.

Ketika tingkat kemiskinan seseorang tinggi ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, kemiskinan dapat berdampak buruk pada ketiga dimensi Indeks Pembangunan Manusia dengan mempengaruhi akses layanan kesehatan berkualitas, terbatasnya pendidikan yang berkualitas, dan menciptakan standar hidup rendah. Faktor-faktor kemiskinan ini menciptakan dampak negatif yang melibatkan risiko penyakit, penurunan harapan hidup, keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, dan kesenjangan sosial. Siklus kemiskinan yang terjadi sulit diputus, dengan anak-anak keluarga miskin memiliki peluang lebih rendah untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Hasil kajian terdahulu oleh (Al-nassery et al., 2019) dan (Dewi, 2017), mendukung studi ini dengan menunjukkan IPM dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh tingkat kemiskinan.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap IPM**

Dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 maka variabel Pendapatan Asli Daerah berdampak positif dan signifikan terhadap IPM.



Arah pengaruh yang positif ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,608681 Akibatnya IPM akan naik sebesar 0,60 % jika PAD meningkat sebesar 1%. Maka dari itu, hipotesis ketiga dalam penelitian diterima. Hal ini sejalan dengan teori keynesian menyatakan ketika terjadi peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan pengeluaran yang telah dirancang dan akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Dapat dimaknai ketika PAD meningkat secara otomatis pengeluaran atau belanja pemerintah juga akan meningkat. Ini nantinya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah ini diperoleh dari pemerintah daerah melalui sumber-sumber seperti pajak kesehatan, retribusi pendidikan, pajak penghasilan, dan retribusi properti memainkan peran penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh PAD terhadap IPM tercermin melalui aspek kesehatan, pendidikan, standar hidup (pendapatan riil per kapita), dan infrastruktur serta pelayanan umum. Ketika pendapatan yang dihasilkan daerah cukup besar, ini akan berdampak pada sektor kesehatan karena dapat dipakai untuk membiayai infrastruktur kesehatan, meningkatkan layanan dasar, dan memperluas akses ke pelayanan medis, yang berkontribusi pada peningkatan harapan hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Demikian pula, pendapatan yang meningkat dari sektor pendidikan dapat mendukung investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan fasilitas pendidikan, yang berkontribusi baik terhadap rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf di suatu daerah. Penting untuk mencatat bahwa efisiensi pengelolaan dan alokasi sumber dana PAD, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan ini akan berkontribusi secara besar dalam meningkatkan IPM. Hasil kajian terdahulu (Verra et al. 2023) dan (Eka et al. 2023) menyatakan korelasi positif dan signifikan PAD terhadap IPM. Hasil ini berbeda dari temuan (Sahlan et al., 2022) yang memaparkan PAD tidak berdampak terhadap IPM di Kabupaten Bima.

#### **Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap IPM**

IPM dipengaruhi secara positif oleh variabel upah minimum, walaupun tidak signifikan. Nilai probabilitas menunjukkan 0,4603 ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05. Koefisien

sebesar 0.697975 mengindikasikan arah pengaruh yang positif. Oleh karena itu, IPM akan naik sebesar 0,69 % untuk setiap kenaikan upah minimum sebesar 1%. Hipotesis keempat pada studi ini ditolak. Hasil ini tidak selaras dengan teori upah efisiensi yang menyatakan ketika upah tinggi ini akan membuat karyawan lebih produktif.

Upah minimum di setiap provinsi, kabupaten, dan kota bervariasi sesuai dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) yang ada di masing-masing daerah. Selain melindungi karyawan, kebijakan pengupahan juga berupaya menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan mendorong perluasan lapangan kerja yang menguntungkan. Disisi lain, untuk menetapkan gaji di dalam perusahaan, pengusaha harus membuat skala dan struktur upah. Akan tetapi pada penerapannya, upah di wilayah Indonesia masih relatif rendah dan belum efektif digunakan untuk jaring pengaman karena kebijakan ini hanya berlaku untuk sebagian kecil pekerja dan buruh. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya segmentasi ekonomi, yang membagi pasar tenaga kerja menjadi sektor formal dan informal. Pada sektor formal dengan adanya penetapan upah minimum akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, dan pada sektor informal yang besaran gajinya tidak dibatasi oleh undang-undang atau tidak diatur dalam regulasi akan menyerap pasokan tenaga kerja tambahan.

Berdasarkan data dari BPS sektor formal menyerap pegawai pada tahun 2015 sebesar 42,25%, 2016 sebesar 42,40%, 2017 sebesar 42,97%, 2018 sebesar 43,02%, 2019 sebesar 44,12%, 2020 sebesar 39,53%, 2021 sebesar 40,55%, dan 2022 sebesar 40,69%. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa lebih dari 50% pekerja bekerja di sektor informal. Sedangkan rata-rata gaji bersih yang didapat berdasarkan data dari BPS pada 34 provinsi, 11 provinsi memiliki rata-rata upah bersih riil yang kurang dari ketentuan upah minimum yang berlaku pada tahun 2022 yakni Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Aceh, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, upah yang rendah ini masih belum mampu menaikkan IPM karena tidak dapat mencukupi keperluan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Temuan (Yulianty, 2023) mengatakan



bahwa IPM pada kabupaten/kota NTT pada tahun 2018 – 2022 tidak dipengaruhi oleh upah minimum. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian (Faizin, 2021) yang menemukan adanya pengaruh signifikan dan berkorelasi positif pada IPM.

### KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa model efek tetap adalah model yang paling baik. Pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif dan signifikan terhadap IPM, ini terjadi karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan cenderung padat modal. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Ketika terjadi peningkatan angka kemiskinan ini akan berdampak pada penurunan nilai IPM. Selanjutnya pada penelitian ini, nilai IPM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel pendapatan asli daerah. Secara khusus, PAD yang lebih tinggi di suatu daerah ini akan berdampak pada alokasi belanja daerah yang lebih tinggi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan terjadi peningkatan nilai IPM. Variabel terakhir yang mempengaruhi IPM pada kajian ini adalah upah minimum provinsi. IPM dipengaruhi secara positif, meskipun tidak signifikan oleh upah minimum provinsi. Ini berarti upah yang ada di Indonesia masih belum bisa menjadi jaring pengaman dan masih menjangkau sebagian kecil pekerja.

Berdasarkan kesimpulan, temuan ini menyajikan rekomendasi kebijakan bahwa pemerintah harus mendorong pemerintah provinsi untuk lebih fokus pada pembangunan SDM melalui peningkatan program pembangunan manusia, khususnya di bidang kehidupan layak, kesehatan, dan pendidikan dengan menilai efektivitas program - program yang ada saat ini dan program yang akan datang. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan meningkatkan produktivitas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memusatkan perhatian pada industri - industri yang mempunyai penyerapan tenaga kerja relatif tinggi dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta, mengoptimalkan pemerataan pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan. Selanjutnya, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kapasitas daerah untuk

mendanai berbagai layanan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, termasuk kesehatan dan pendidikan. Selain itu, penting untuk meningkatkan upah minimum provinsi dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang memberikan upah dibawah standar minimum.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bahan literatur bagi para akademisi yang mengerjakan proyek serupa di masa depan dengan berbagai faktor yang secara signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Untuk meningkatkan efektivitas data yang dikumpulkan, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengukur dampak kondisi ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara lebih mendalam.

### DAFTAR PUSTAKA

- All, V. et. (2023). *Jrak jurnal riset akuntansi dan bisnis*. 221–227.
- Al-nassery, A. D., Sami, K., Hallaq, A., & Yarmouk, U. (2019). 2003 - 2016. 20, 552–562.
- Amelinda, D. V. (2022). *Independent : Journal Of Economics E-ISSN : 2798-5008*. 2, 159–174.
- Azzahra, D. D. G., & Desmawan, D. (2023). *Analysis of the Effect of Economic Growth and Poverty on Community Welfare in 34 Indonesian Provinces*. (in Indonesian). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22034–22044.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. In PT Rajagrafindo Persada.
- Dewi, N. (2017). *Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi riau*. 870–882.
- Dr. Mulyaningsih, M. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*.
- Faizin, M. (2021). *Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>.
- Fernandes, J., & Putra, M. L. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. *Menara*



- Ekonomi, VIII(1), 18–29.
- Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnومي*, 2(1), 12-17
- Handalani, R. T. (2018). Determinant of Human Development Index in Southeast Asia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(2), 118–137. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v2i2.44>
- Handayani, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, dan Belanja Modal Terhadap IPM DI 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2019. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 4(2), 17 – 26. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/bisecer/article/view/242/194>
- Harjunadhi, J. T., & Rahmawati, F. (2020). Pengaruh belanja pendidikan , belanja kesehatan , dan ump terhadap ipm di indonesia tahun 2014 – 2018 The effect of education spending , health spending , and ump on IPM in Indonesia in. 16(2), 241– 249.
- Hasibuan, S. L., Rujiman, & Sukardi. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 139–141.
- Heny Yulianty, B. I. E. I. (2023). Analysis of the Human Development Index in East Nusa Tenggara 2018-2022. *Jurnal Ekonomi*, 12(04), 1707–1712. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/3189%0Ahttps://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/3189/2614>
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, Dan Teknologi Terhadap Ipm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 23(4), 122–137.
- Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Asri Dwija Putri, I. G. A. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. *E - Jurnal Akuntansi*, 31(2), 401. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p11>
- Ilmiah, J., Studi, P., Perpajakan, A., Lampung, P. N., & Lampung, B. (2023). Index in District and Cities in Lampung Province in 2016-2019 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016- Pendahuluan. 17(2), 136–147.
- Islamiatus Izzah, C., & Martha Hendarti, I. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, Dan Pdrb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Jawa Tengah. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, V, 99 – 106. <https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.3392>
- Journal, I., Economics, O. F., & Studies, F. (2021). The Effect Of Inflation And Wages On Unemployment In East. 8055, 65–81. <https://doi.org/10.34109/ijefs>.
- Karampuan, A., Ekonomi, F., Mulawarman, U., Lestari, D., Ekonomi, F., & Mulawarman, U. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. 1(3), 66–76.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Seuk, G. (2021). Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Nusa Tenggara Timur. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 41–56. <https://doi.org/10.55583/invest.v2i1.128>
- Komariyah, S., Priyono, T. H., & Nathania, C. A. (2023). Impact of Poverty, Economic Growth, and Information and Communication Technology on Human Development. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 26(1), 129. <https://doi.org/10.14414/jebav.v26i1.2939>
- Mankiw. (2007). *Makro Ekonomi*. Erlangga.
- Maulana, R., Pitoyo, A. J., Arif, M., & Alfana, F. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. 23(1), 12–24.
- Maulana, I., Salsabila, Z., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Dan PDRB Terhadap IPM Di Wilayah Provinsi Banten Pada Tahun 2019–2021. *Jurnal*



- Ekuilmn, 4(2), 164-170
- Mayang Dwi Pitaloka, & P.S Prabowo. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ipm 14 Kabupaten Kategori “Sedang” Di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(2), 1–12.  
<https://doi.org/10.29407/jae.v7i2.17692>
- Miswati Gultom, Anggiat Sinurat, & Darwin Damanik. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilmn*, 2(1), 12–17.  
<https://doi.org/10.36985/ekuilmn.v2i1.347>
- Muhamad, A. R., & Rahmi, D. (2023). Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jabar. 45–52.
- Nopriyanto Bahasoan, A., Ibnu Khaldun, R., Rahmat, A., & Hidayat Tahawa, T. B. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Tengah Economic Growth and Human Development Index in the Central Sulawesi Province. *Bomba : Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 74–83
- Nugraeni, A. R. (2021). Anindya Rahardian Nugraeni, 2021. *Journal Of Economics*, 1, 1–15.
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1049 – 1061.  
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.121>
- Rinawati, Y., Aulia, F., Miftitah, N., Aldianto, F. A., & Hafidz, M. (2022). Pengaruh PDRB, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021. *Jurnal Ecogen*, 5(4), 517–527.
- Sadono Sukirno. (2013). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. PT. Raja Garfindo Persada.
- Sahlan, E., Yusuf, Y., & Susanto, D. (2022). Pengaruh Pendataan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 4(1), 18–22.  
<https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4592>
- Sania, L., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan UMR Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Bharanomics*, 2(1), 33–46  
<https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.189>
- Sarkoro, H., & Zulfikar, Z. (2018). Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se- Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54–63.  
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1972>
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilmn*, 2(1), 40-48
- Statistik, B. P. (2024). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id>
- Suhartini, E. (2020). Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*, 145.
- Syofya, H. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177–185.  
<https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilmn*, 2(2), 135-148
- Tirza Meireny Patadang, Tri Oldy Rotinsulu, I. P. F. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(1), 132–149.
- UNDP. (n.d.). United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/>
- Winarti, V. P., Erliantari, F., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten 2017–2021.



Jurnal Ekuilnomi, 4(2), 155-163  
Zaborovskaia, O., Nadezhina, O., &  
Avduevskaya, E. (2020). The Impact of  
Digitalization on the Formation of Human  
Capital at the Regional Level. *Journal of  
Open Innovation: Technology, Market,  
and Complexity*, 6(4), 184.  
<https://doi.org/10.3390/joitmc6040184>

